

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pelaksanaan pengawasan pohon pelindung di Kota Padang telah berjalan secara normatif sesuai dengan fungsi pengawasan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, pembahasan LKPJ, kunjungan lapangan (sidak), serta pemberian rekomendasi kepada kepala daerah. DPRD menjaga batas kewenangan dengan tidak masuk ke ranah teknis operasional, melainkan berfokus pada evaluasi kebijakan dan kinerja. Secara prosedural mekanisme tersebut telah mencerminkan prinsip checks and balances, namun secara substantif masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada indikator kinerja yang terukur dan sistem pengawasan yang komprehensif.
2. Kendala pengawasan yang dihadapi DPRD bersifat struktural dan fungsional. Dari sisi internal, pengawasan masih bergantung pada laporan eksekutif serta belum didukung sistem data yang terintegrasi. Dari sisi eksternal, keterbatasan sumber daya DLH, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap ketentuan perlindungan pohon pelindung turut mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kelemahan struktural dalam tata kelola pengawasan (structural weakness in oversight governance), di mana desain pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang kuat dan koordinasi yang optimal antar lembaga.

3. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan pengawasan DPRD telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan al-hisbah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat. DPRD sebagai representasi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menjalankan fungsi kontrol untuk menjaga hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan sehat. Pengawasan terhadap pohon pelindung berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian, implementasinya masih memerlukan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas agar tujuan kemaslahatan dapat terwujud secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintahan kota Padang

Pemerintah Kota Padang, khususnya DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperkuat sistem pengawasan terintegrasi dan berbasis indikator kinerja yang terukur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pohon pelindung. DPRD optimalisasi fungsi pengawasan melalui evaluasi berkala yang berbasis data serta memperkuat transparansi hasil pengawasan kepada publik. Sementara itu, DLH diharapkan meningkatkan kapasitas teknis, pemeliharaan preventif, serta penegakan sanksi secara konsisten guna menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Kepada Masyarakat Kota Padang

Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga serta melindungi pohon pelindung sebagai bagian dari hak dan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan daerah dan pelaporan terhadap pelanggaran lingkungan menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan keberlanjutan kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada. 2005.
- Adnan, Indra Muchlis dan Sufian Hamim. 2013. Organisasi dan Manajemen. Yogyakarta: Transmedia Grafika.
- Al-Mawardi, Imam. 2017. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi. 1989. Al-Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qabthi dan Muhammad Abdul. 2003. Ushul Al-Idariyah Asy-Syariyah, Cet. 1. Bayt ats-Tsaqifah. hlm. 7.
- Amiruddin. 2016. Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pengawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. Jurnal Gema Kampus, Vol. XI. hlm. 12.
- Anggriani, Jum. 2011. Pelaksanaan Pengawasan Pemeintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. Jakarta: Penerbit Universitas Tama Jagakarsa.
- Anwar, C., & Hanim, Z. 2025. Pengembangan Kapasitas Lembaga (Strategi dan Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Sistem Layanan dan Kelembagaan). Journal on Education, 7(2).
- Aridhayandi, M. Rendi. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 48 No. 4. hlm. 886.
- Aryani, Laela. 2020. Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyasah* Idariyyah, Skripsi Purwokerto: UIN Purwokerto. hlm. 29.

- Asis, Nurul Hikma. 2022. Analisis Siyasaah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. IAIN Parepare: Hukum Tata Negara.
- Asmara, Galang. 2024. Rekonstruksi Sistem Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Oleh Pemerintah. Proceeding APHTN-HAN. Vol. 2 No. 1. hlm. 6.
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku. 2015. Regulasi Mekanisme Pengawasan Perda. Tulisan Hukum: BPK Maluku.
- Bagas Rio R, M., Dewi, R. K., & Agustina, S. 2021. Tinjauan Fiqh Siyasaah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, 5(2).
- Darmawan. 2019. Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik. Airlangga Development Journal, 2(1).
- Delvita, P. 2025. Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Dewi, R. K., & Agustina, S. 2021. Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, 5(2).
- Fausia, Risky. 2023. Telaah *Siyasaah Idariyah* terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Tamaona. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Hadratul Madaniyah. (2024). Widia Rahmat & Luci Afiani Oktavia. Urgensi Administrasi Publik dalam Islam: Tinjauan Masalah Mursalah. Jurnal Hadratul Madaniyah, 11(1).
- Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen; Cetakan Ke- 17. Yogyakarta: BP Fakultas Ekonomi.
- Hardjasoemantri, K. (2005). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Helmi. 2022. Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Ketuhanan dan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol. 6 No. 1. hlm. 19.
- Ibn Taimiyah. (1995). *Al-Siyasah Al-Syar'iiyyah*. Cairo: Dar al-Hadits, p. 97.
- Ibnu Rusydi. (2023). Good Governance According To Islamic Perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(4).
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: Gaya media Persada.
- Irham Ali. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Musik di Indonesia: Perspektif Siyasah Idariyah. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Junaidi, Muhammad dan Zaenal Arifin. 2023. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkualitas di Pemerintah Daerah. *Jurnal Juridisch*. Vol. 1 No. 3. hlm. 220-221.
- Kaehuwoba, Nofita Nur. 2018. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Administratum*. Vol. VI No. 1. hlm. 92.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2010. Gramedia Pustaka Utama.
- Khairi, Mawardi. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum. Vol. 3 No. 5. hlm. 80.
- Kurnia, Shinda Dwi. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Idariyah Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah). Skripsi: UIN Imam Bonjol Padang.

- LAN (Lembaga Administrasi Negara). (2003). Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: LAN.
- Layuck, Kezia M. 2020. Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*. Vol. VIII No. 3. hlm. 127.
- Litualy, J. R., & Nindatu, A. (2023). Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kelimaz Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. hlm. 154.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- Nata, A. (2014). *Pendidikan Islam dan Siyasah*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nita, Yureya, dkk. 2023. Penanaman Pohon Pelindung sebagai Upaya Penghijauan Lingkungan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 4 No. 1. hlm. 112.
- Nuralam, Kadir, Abdul Adnan Ma'ruf. 2017. Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi*. Vol. 3 No. 3. hlm. 328-329.
- Nurbaningsih, Enny. 2011. Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 1. hlm. 176
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*. Lampung: Universitas Lampung. hlm. 82.
- Nursyamsi, Fajri. 2015. Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 3.

- Nusalawo, Modesta, Victor Juzuf dan Eric Stenly. 2022. Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 7. hlm. 741.
- Pratama, Jovanda Efrian. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung. Padang: Universitas Andalas.
- Prayitno, Suko. 2017. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 8 No. 2. hlm. 111.
- Purnama, Wati, E. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1).
- Putra, Y. M., Putri, N. E., & Umar, G. (2025). Upaya Perbaikan Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Literatur. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2).
- Qomaruddin, Halimah Sa'diyah. 2024. Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*. Vol. 1 No. 2. hlm. 81.
- Rahayu, Tri. 2009. Analisis siasah Ida Ria terhadap kasus kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) Ganda di Deda Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. UIN Sunan Ampel. hlm. 21.
- Rahmawati, N., & Hamid, I. 2025. Wujud Antroposentrisme pada Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 4(1).

- Rahmawati. 2018. Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam. Jurnal Pemerintahan dan Politik Global. Vol. 3 No. 2. hlm. 58.
- Ramadhani, Vika. Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pelayanan Publik Pembuatan E-KTP di Desa Medan Estate Dalam Kajian *Siyasah*. Skripsi: UIN Sumatera Utara.
- Rilfayanti. 2013. Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Pamona Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Administratic Edisi 01. Vol. 01. hlm. 15.
- Rizki, A. M., Jawwad, M. A. S., & Sujarwa, S. (2023). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). INSOLOGI (Jurnal Sains dan Teknologi), 2(2).
- Rojak, Jeje Abdul. 2004. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers. hlm. 88-89.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, Dwi Novita, dkk. 2022. Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam. Jurnal Ekonomika dan Bisnis. Vol. 2 No. 3.
- Sedubun, Victor Juzuf. 2015. Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 1 No. 2. hlm. 169-170.
- Siagian, Sondang P. 2006. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Simbolan, Gustina Marito. 2022. Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatra Utara Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 68 Dalam Tinjauan Fiqh *Siyasah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. hlm. 22.

- Sodiqin, Ali. Fiqh dan Ushul Fiqh. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing.
- Sudrajat, Achmad sodik. Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. VII No. 3. hlm. 157.
- Sujanto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 2.
- Sukardja, Ahmad. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih *Siyasah*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 240.
- Sukriono, Didik. 2013. Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi. Malang: Setara Press. hlm. 139.
- Suparmoko, Muhammad. 2020. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. Jurnal Ekonomika dan Manajemen. Vol. 9 No. 1. hlm. 40.
- Suvia, Risa. 2023. Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Kecamatan Beutong Nagan Raya Ditinjau Dari Perspektif Fiqh *Siyasah*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Taufan, Andi, dkk. 2021. Hukum Lingkungan. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Triwulan, Titik. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 454.
- Tutik, Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana. hlm. 475.
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP.
- Ventyrina, Ine dan Siti Kotijah. 2020. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Wahid, M. Yunus. 2018. Pengantar Hukum Lingkungan. Jakarta: Prenada Media Group.

Winardi. 1990. Manajemen. Bandung: Mandar Maju.

Yanti, Herma. 2010. Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jurnal Lex Specialis. No. 11. hlm. 40.

Zakarsi, A. 2011. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Vol. 2 No. 1. hlm. 51.

Zulfirman, Rony. 2022. Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran. Vol. 3 No. 2. hlm. 150.

Zulpikar, & Faozan, H. (2010). Antara Harapan dan Realita: Implementasi Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, 7(2).

B. Website dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung.

Amaechi, T. 2021, Oktober 11. 7 Prinsip Pengelolaan Lingkungan. Environment Go! Diakses 29 November 2025 dari <https://environmentgo.com/id/principles-of-environmental-management/>

Info Publik. (2023, 20 Juni). Bakar Pohon Pelindung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Lakukan Proses Tipiring terhadap Seorang Warga. Diakses pada 20 Juli 2025 dari

<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/751313/bakar-pohon-pelindung-satpol-pp-padang-lakukan-proses-tipiring-terhadap-seorang-warga?video=>.

Langgam, id. (2024, 7 Juli). Satpol PP Padang Tertibkan Baliho dan Iklan yang Terpasang di Pohon serta Taman Kota. Diakses pada 24 Juli 2025 dari <https://langgam.id/satpol-pp-padang-tertibkan-baliho-dan-iklan-di-pohon-serta-taman-kota/>

Minangkabau News. (2025, 15 Juni). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Serahkan 5 Unit Mesin Potong Kayu untuk Perawatan Pohon Pelindung. Diakses pada 20 Juli 2025, dari <https://minangkabaunews.com/wakil-ketua-dprd-padang-serahkan-5-unit-mesin-potong-kayu-untuk-perawatan-pohon-pelindung/?amp>

C. Wawancara

Chandra, S.T. 2025. (Kepala Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang). Hasil Wawancara Pribadi. 9 Januari 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

M. Ihsan. 2025. (Tim Survei dari Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Padang). Hasil Wawancara Pribadi. 3 Februari 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Sitti Kurnia Apriliani, SP.,MPWK. 2025. (Analisis Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang) Hasil Wawancara Pribadi. 4 September 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Hendrizar Azhar, SH.,MM. 2026. (Sekretaris DPRD Kota Padang). Hasil Wawancara Pribadi. 8 September 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Efrizal, SH. 2025. (Kepala Seksi P3 Satuan Polisi Pamong Praja PP Kota Padang). Hasil Wawancara Pribadi. 4 Agustus 2025. Satuan Polisi Pamong Praja.